BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat pebedaan yang signifikan dari efektiitas pajak daerah sebelum dan setelah adanya pemekaran pada Kabupaten Gorontalo. Kemudian dilihat dari analisis komparatif antara efektivitas sebelum dan setelah pemekaran ditemukan bahwa efektivitas pajak daerah sebelum adanya pemekaran lebih rendah dibandingkan dengan efektivitas setelah adanya pemekaran. Sehingga dapat dikatakan bahwa pada periode setelah dilakukan pemekaran, pemerintah Kabupaten Gorontalo cenderung melakukan berbagai tindakan penting dalam meningkatkan efektivitas penerimaan pajak daerah Kabupaten Gorontalo.
2. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kontribusi pajak daerah bagi pendapatan asli daerah sebelum dan sesudah adanya pemekaran. Kemudian dilihat dari analisis komparatif antara kontribusi pajak daerah bagi pendapatan asli daerah sebelum dan setelah pemekaran ditemukan bahwa kontribusi pajak daerah sebelum pemekaran lebih besar dibandingkan dengan setelah pemekaran. Hal ini karena konstruk dari pengukuran kontribusi yang menekankan bahwa pendapatan asli daerah sebagai pembagi. Sehingga dapat

dikatakan bahwa pada periode setelah pemekaran, pajak daerah mengalami peningkatan namun masih lebih besar peningkatan dari pendapatan asli daerah Kabupaten Gorontalo.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah Kabupaten Gorontalo terus meningkatkan anggaran pajak daerah yang ditetapkan. Hal ini karena pada periode setelah adanya pemekaran efektivitas pajak daerah jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai sebelum pemekaran. Langkah yang perlu dilakukan yakni dengan melakukan intensifikasi (pembenahan SDM yang memungut pajak daerah terutaama dalam hal kejujuran pada pengumpulan pajak galian C dan batuan mineral) dan ekstensifikasi pajak daerah (melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pajak daerah) bagi pembangunan daerah.
2. Sebaiknya pemerintah Kabupaten Gorontalo tidak mengeluarkan kebijakan yang dapat mengurangi pajak daerah. Hal inilah yang menyebabkan pajak daerah tidak begitu besar. Langkah yang perlu dilakukan yakni menerapkan denda atau sanksi atas ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak daerah di Kabupaten Gorontalo. Sehingga secara agregat jumlah peningkatan asli daerah seimbang dengan persentase peningkatan pajak daerah di Kabupaten Gorontalo.

DAFTAR PUSTAKA

Danang Purnomo Hananto. 2014. Analisis perbandingan penerimaan pajak pajak penerangan jalan Pendapatan asli daerah sebelum dan sesudah pemekaran daerah Pada pemerintahan kabupaten tangerang. *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma.*

Halim, Abdul. 2007. *Manajemen keuangan daerah.* Yokyakarta: UPP AMP YKPN.

Irsandy Octovido, Nengah Sudjana dan Devi Farah Azizah. 2014. Analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah kota batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 15 No. 1 Oktober*

Koswara. 2000. *Otonomi dan Pajak Daerah*. Jogjakarta: PT Gramedia WidiasaranaIndonesia.

Lahabu, Andi. 2014. Analisis Kontribusi Penerimaan Daerah Bagi Belanja Daerah Di Kabupaten Pohuwato. *Skripsi* Universitas Negeri Gorontalo.

Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah.* Yogyakarta, Andi Yogyakarta.

Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah.* Jakarta: Grasindo.

Nuringsih, Mera. 2012. Analisis penerimaan pajak daerah dan retribusi sebelum dan setelah desentralisasi fiskal di propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. *Tasis Universitas Indonesia*

Rahman Nikmah Astuti, Amran Naukoko dan Albert Londah. 2014. Analisis perbandingan kemampuan keuangan daerah Di provinsi Sulawesi Utara (studi pada kota Manado dan kota Bitung Tahun 2008-2012). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 14 no. 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan Universitas Sam Ratulangi, Manado*

Sabarno, Hari. 2007. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika

Santoso, Brotodihardjo, R. 1995. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak.* Bandung: Penerbit Eresco.

Santoso, Singgih. 2012. *Aplikasi SPSS Statistik Parametrik*. Jakarta: PT. Elex Komputindo.

Sekaran. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat

Sugiono, Ikhwan. 2013. Analisis Perbandingan penerimaan pajak Reklame dan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan asli daerah sebelum dan sesudah Pemekaran daerah pada pemerintahan Kabupaten tangerang. *Skripsi* Jurusan akuntansi Fakultas ekonomi dan bisnis, Universitas islam negeri syarif hidayatullah.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Penerbit ALFABETA.

Sugiyono. 2014. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Penerbit ALFABETA.

Syahrial dan Sotuyo. 2014. Peranan pendapatan asli daerah (pad) dalam Pelaksanaan otonomi daerah di kota Lhokseumawe. *Jurnal Kebangsaan, Vol.3 No.5 Januari 2014 ISSN: 2089-5917*

_____, UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

_____, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

_____, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

_____, Undang-undang Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

_____, Undang-undang No.18 Tahun 1997 tentang Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah.

_____, PP No. 129 tahun 2000 tentang persyaratan dan tata cara pembentukan daerah otonom baru.

_____, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah

_____, Undang-Undang republik indonesia Nomor 11 tahun 2007 Tentang Pembentukan kabupaten gorontalo utara di provinsi gorontalo

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah

Redaksi Jawa Pos. 2015. http://www2.jawapos.com/baca/artikel/15019/Government-Mobile-Inovasi-Bupati-Gorontalo-David-Bobihoe. Diakses 21 September 2015